

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM DISKURSUS PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DI INDONESIA

Oleh:

Komang Ekayana, NIM. 1614101109

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menambah pemahaman penulis mengenai bagaimana memahami makna asas legalitas agar mengakomodir hukum pidana adat, dan (2) mengetahui akibat hukum yang timbul jika diakomodasinya hukum pidana adat kedalam hukum pidana Indonesia. Maka, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konsep, dan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan sehingga bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah meneliti kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Ius constituendum* dalam perluasan makna asas legalitas yang dimana bertujuan untuk mengakomodir hukum pidana adat istilah tersebut adalah asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Dasar hukum suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya dilandasi legalitas formil, tetapi juga ada pengecualian legalitas materiil, yaitu memberi tempat kepada hukum pidana adat, dan (2) akibat hukum yang timbul jika diakomodasinya hukum pidana adat ke dalam hukum pidana Indonesia adalah penegakan hukum pidana adat menjadi wewenang negara melalui Pengadilan.

Kata kunci : Asas legalitas, formil dan materiil, KUHP

***THE EXISTENCE OF CUSTOMARY CRIMINAL LAW IN THE DISCOURSE
ON THE MEANING OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN INDONESIA***

By:

Komang Ekayana, NIM, 1614101109

Study Program Law Science

ABSTRACT

This study aims to (1) increase the author's understanding of how to understand the meaning of the principle of legality in order to accommodate customary criminal law, and (2) find out the legal consequences that arise if customary criminal law is accommodated into Indonesian criminal law. *Therefore this paper uses a normative research methods or literature with the types of approach to legislation, concepts, and historical. The sources of legal materials used cannot be separated from Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 5 paragraph (3) sub b of the Emergency Law Number 1 of 1951. The technique of collecting legal materials is carried out by means of a literature study so that the collected legal materials are analyzed by using descriptive techniques. The result of the study show that (1) Ius constituendum in the expansion of the principle of legality which aims to accommodate customary criminal law, the term is the principle of formal legality and the principle of material legality. The legal basis for an act to be punished is not only based on formal legality, but there are also material legal exceptions, namely giving place to customary criminal law, and (2) the legal consequences that arise if customary criminal law is accommodated into Indonesian criminal law is namely that the enforcement of customary criminal law becomes the authority of the state through the Court.*

Keywords: Principle of legality, formal and material, KUHP, customary law